BAB 4
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Analisis permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah awal yang tepat untuk dilakukan, agar pemerintah daerah dapat menemukan isu utama yang dihadapi sebagai bahan untuk mendalami pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan yang berasal dari analisa lingkungan eksternal dan internal dapat menjadi prediksi terhadap berbagai peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malinau. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bagian dari isu-isu strategis yang perlu untuk menjadi perhatian dalam penyusunan kerangka kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Malinau. Isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Malinau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan (sustainability) pembangunan di Kabupaten Malinau.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Malinau merupakan evaluasi atas kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih tepat dalam memprioritaskan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Malinau

dapat meliputi aspek kondisi wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek layanan umum serta yang tak bisa diabaikan adalah aspek keuangan daerah. Berdasarkan data yang tersedia dan deskripsi tentang empat aspek pembangunan tersebut teridentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Malinau sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Kondisi Wilayah

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara, berada di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan, Sesayap, Sembakung dan Sebuku, dimana sebagian besar wilayah berada di ketinggian > 300 m dpl, bergunung dan berbukit dengan kelerengan yang umumnya terjal. Pada wilayah yang demikian terbentang Hutan Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan kawasan dengan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Kalimantan dan ikon Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan kawasan yang diperuntukan bagi perlindungan kawasan secara alami dan juga berpemandangan indah, yang penting secara nasional dan internasional serta mempunyai nilai dalam pemanfaatan ilmiah (ilmu pengetahuan), rekreasi/pariwisata dan juga pendidikan. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten Malinau adalah bagaimana dapat mempertahankan kelestarian ekosistemnya agar dapat menyangga perikehidupan wilayah sekitarnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara perlahan dari waktu ke waktu Pemerintah Kabupaten Malinau dihadapkan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup, seperti degradasi hutan, kerusakan hutan, alih fungsi lahan hutan untuk peruntukan lainnya. Dimana permasalahan lingkungan hidup tersebut berdampak langsung pada penurunan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Malinau (Lihat Tabel 4.1), khususnya jika ditinjau berdasarkan tutupan hutannya.

Dalam hal kependudukan (demografi) Kabupaten Malinau masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan: (1) pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan berada di atas

pertumbuhan penduduk nasional dan Kalimantan Utara; (2) ketimpangan jenis rasio jenis kelamin, dimana penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya; dan (3) rendahnya tingkat kepadatan penduduk, dimana penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan (Lihat Tabel 4.1).

Tabel 4. 1
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Kondisi Wilayah

Aspek Kondisi Wilayah		Permasalahan
1.	Geografi	1. Meningkatnya permasalahan lingkungan hidup yang mengancam peran sebagai kabupaten penyangga lingkungan hidup wilayah sekitarnya 2. Penurunan daya dukung lingkungan hidup
2.	Demografi	1. Tingginya pertumbuhan penduduk 2. Ketimpangan rasio jenis kelamin 3. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fakta menunjukan bahwa dari waktu ke waktu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan baik ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, kemiskinan, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Tetapi hal ini bukan berarti tantangan pembangunan atas peningkatan kesejahteraan masyarakat ini telah terselesaikan, karena pada kenyataannya masih ada masyarakat miskin, menganggur, timpang pendapatannya dan tidak semua angkatan kerja bekerja. Sementara jika dilihat pertumbuhan ekonominya, Kabupaten Malinau masih dihadapkan oleh permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil (fluktuatif) dan PDRB yang bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih, yaitu sektor pertambangan, khususnya tambang batu bara. Permasalahan-permasalahan terkait dengan kesejahteraan masyarakat ini disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat		Permasalahan
1.	IPM	Kemampuan masyarakat untuk mengakses/memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan masih berada pada batas bawah level kesejahteraan tinggi
2.	Indeks Gini	Distribusi tingkat ketimpangan pendapatan berada pada batas bawah ketimpangan rendah (0,289)
3.	Kemiskinan	Masih adanya penduduk berstatus miskin akibat keterisolasian (> 6.000 jiwa)
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	TPAK cenderung fluktuatif (dari 100 penduduk Kabupaten Malinau terdapat 69 s/d 75 penduduk yang potensial untuk mengisi lapangan kerja).
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Masih adanya pengangguran terbuka cenderung mengalami peningkatan
6.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara
7.	PDRB	PDRB bertumpu pada sumber daya alam tak dapat pulih
8.	Inflasi	Belum terkendalinya tingkat inflasi.

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020

4.1.3. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Layanan Umum

Pelayanan umum yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, layanan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup dan lain-lain merupakan sesuatu yang sifatnya *urgent* bagi masyarakat, yang kemudian mendukung capaian kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan layanan umum ini Pemerintah Kabupaten Malinau telah menunjukkan kinerja yang cukup berhasil. Tetapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan aspek layanan umum ini harus terus mendapatkan perhatian untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Permasalanan berkenaan dengan layanan umum ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Layanan Umum

Aspek Layanan Umum		Permasalahan
1	Pendidikan	• APS, APK dan APM yang masih berfluktuatif • Adanya penduduk usia sekolah yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan
2	Kesehatan	Masih adanya kasus gizi buruk, kematian ibu dalam melahirkan, angka kematian dalam kelahiran
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Infrastruktur yang belum memadai (optimal)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum tuntasnya permasalahan permukiman kumuh
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum maksimalnya jaminan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6	Sosial	Belum terselesaikannya penanganan sosial PMKS, fakir miskin dan KAT
7	Tenaga Kerja	Belum tuntasnya penanganan pengangguran
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan belum menunjukkan kemajuan signifikan
9	Ketahanan Pangan	Belum maksimalnya jaminan ketersediaan pangan utama
10	Lingkungan Hidup	Masih minimnya penanganan kualitas lingkungan hidup
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP, akte perkawinan, akte kelahiran, akte kematian dan kartu keluarga
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih adanya cakupan sasaran kepesertaan KB baru dan layanan KB aktif yang belum terdata atau terlaporkan
13	Perhubungan	Kecenderungan peningkatan arus kedatangan dan keberangkatan orang
14	Komunikasi dan Informatika	Fasilitas teknologi informasi belum tersedia di seluruh desa
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kemampuan koperasi dalam manajemen masih rendah
16	Penanaman Modal	Masih rendahnya nilai investasi
17	Kepemudaan dan Olahraga	Rendah prestasi organisasi kepemudaan dan olah raga
18	Statistik	Kecukupan data dan validitas data untuk perencanaan pembangunan masih belum terpenuhi
19	Persandian	Belum optimalnya penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
20	Perpustakaan dan kearsipan	Masih kurangnya (belum optimalnya) layanan kepustakaan dengan model *hybrid libarary*
21	Pariwisata	• Rendahnya kunjungan wisata

Aspek Layanan Umum		Permasalahan
		• Belum memadainya fasilitas wisata daerah
22	Pertanian	Rendahnya produktifitas tanaman pangan
23	Kelautan dan Perikanan	Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap
24	Kehutanan	Degradasi dan rendahnya reboisasi- rehabilitasi hutan dan lahan
25	Perindustrian dan Perdagangan	Rendahnya pertumbuhan dan kontribusi industri kecil dan rumah tangga
26	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Belum primanya tata kelola pemerintahan

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

4.1.4. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing Kabupaten Malinau ditinjau berdasarkan daya saing ekonomi, infrastruktur dan kualitas SDM masih perlu terus ditingkatkan dan menjadi permasalahan penting yang harus mendapat perhatian. Hal ini mengingat: (1) daya saing ekonominya masih bertumpu pada sektor primer seperti pertambangan dan pertanian dalam arti luas; (2) daya saing infrastrukturnya masih rendah, khususnya jika dilihat dari infrastruktur jalan, ketenagalistrikan dan jaringan air; dan (3) daya saing SDM yang masih rendah, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas (Lihat Tabel 4.4).

Tabel 4. 4
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah		Permasalahan
1	Ekonomi Daerah	Daya saing ekonomi daerah bertumpu pada sektor primer
2	Infrastruktur	Rendahnya daya saing infrastruktur (jalan, jembatan, listrik dan air), infrastuktur pencegah dan pengendalian banjir
3	Iklim berinvestasi	Masih adanya gejolak dan konflik sosial di masyarakat yang perlu untuk diselesaikan
4	Perijinan	Pelayanan perijinan masih terbatas jenis dan jumlahnya
5	Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya daya saing SDM

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

4.1.5. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Keuangan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Malinau ditinjau berdasarkan aspek keuangan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Keuangan Daerah

	Aspek Keuangan Daerah	Permasalahan
1	Pendapatan daerah	Pendapatan daerah yang cenderung fluktuatif
2	Belanja daerah	Belanja yang cenderung fluktuatif
3	Aset	Aset yang cenderung meningkat
4	Ekuitas	Ekuitas yang cenderung menurun
5	Pengelolaan pendapatan daerah	a. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur dalam mengelola kegiatan dan administrasi keuangan b. Masih rendahnya profesionalisme penyedia jasa pembangunan
6	Belanja daerah	Tidak signifikannya kenaikan realisasi transfer

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan pada berbagai urusan pemerintahan serta memperhatikan masukan dan kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) teridentifikasi lima permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kabupaten Malinau, yaitu:

(1) Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat;
(2) Belum optimal layanan umum;
(3) Masih rendahnya daya saing daerah;
(4) Masih rendahnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
5) Belum optimalnya tata kelola keuangan daerah.

Secara lebih lengkap permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Malinau, sebab-sebab permasalahan pembangunan dan akibat yang terjadi adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 4.1.

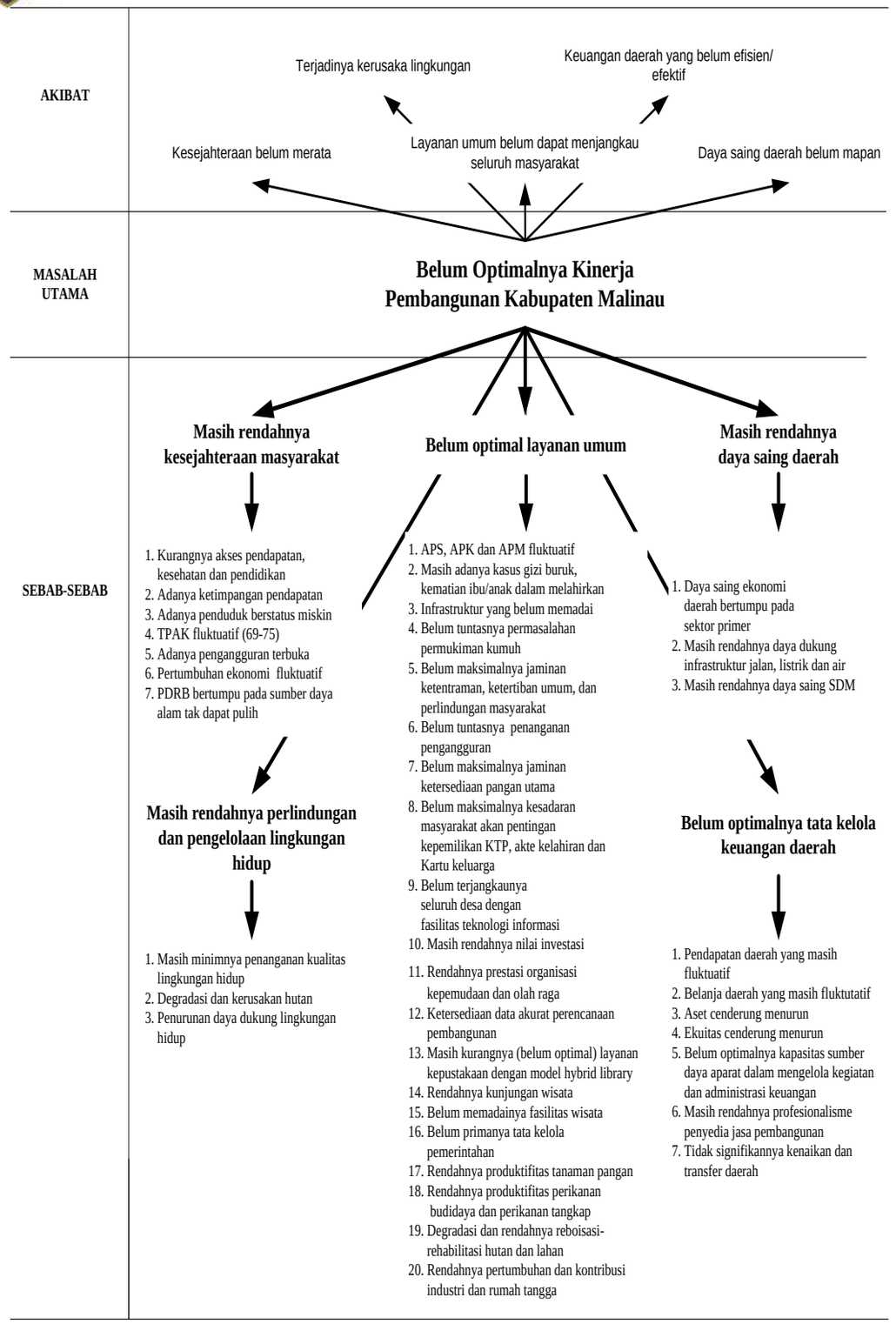

Gambar 4. 1Ilustrasi Pohon Permasalahan Pembangunan Kabupaten Malinau

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

4.2 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang, karena isu strategis dapat menjadi dasar bagi perumusan visi,

misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Isu-isu strategis dapat dirumuskan melalui identifikasi berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang dapat memberi pengaruh krusial terhadap pelaksanaan pembangunan daerah masa kini maupun 5 (lima) tahun ke depan.

Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan diterimanya(*acceptability*)prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara bertanggungjawab. Selain itu, dengan pemahaman atas isu-isu strategis diharapkan pemerintah/lembaga/organisasi dapat memiliki kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan kondisi perkembangan lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam hal rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Malinau, identifikasi isu-isu strategis dimaksudkan untuk dapat mengarah kepada fokus dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis dimaksud mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan pada isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun, jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran tidak dapat direalisasikan.

Secara umum isu-isu strategis tersebut dapat diilustrasikan dengan Gambar 4.2. yang diuraikan secara rinci pada bagian selanjutnya.

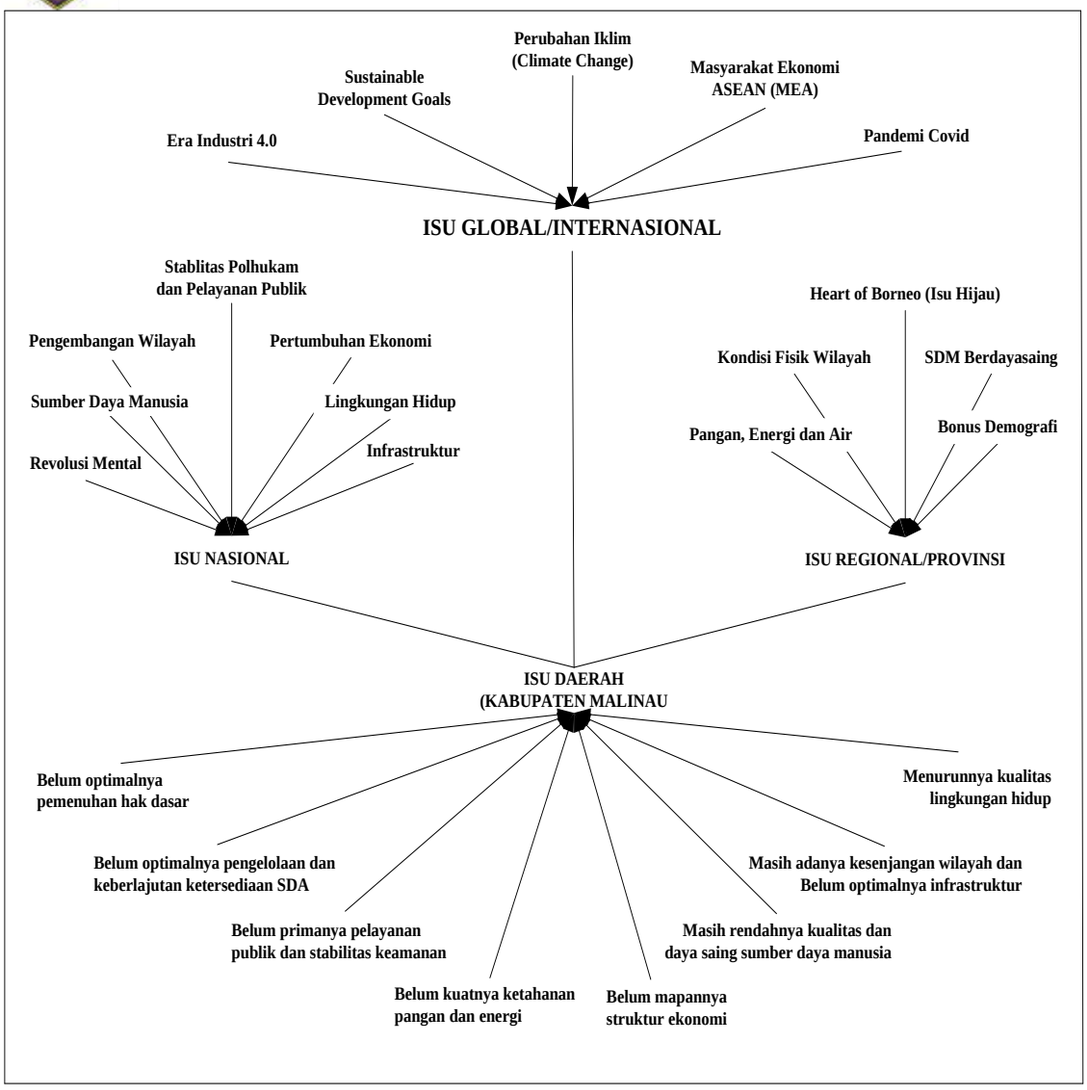

Gambar 4. 2Ilustrasi Isu-isu Strategis Global, Nasional dan Daerah

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Malinau, 2020.

Selanjutnya isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Malinau dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu yang berkembang baik yang terjadi di tingkat internasional, nasional, provinsi maupun yang terjadi di Kabupaten Malinau sendiri (daerah). Berkenaan dengan isu strategis tersebut diuraikan pada bagian berikut.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kesepakatan pembangunan global yang dimulai tahun 2016. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 berisi seperangkat tujuan

transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Adapun SDGs tersebut memiliki 17 Tujuan sebagai berikut:

1) Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di manapun.
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang
8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang
9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi
10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara
11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan
12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
15) Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan

memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan
17) Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs yang menekankan kepada pembahasan-pembahasan indikator-indikator pembangunan untuk mengatasi berbagai isu-isu strategis, meliputi: (1) kemiskinan; (2) ketahanan pangan; (3) gizi; (4) kehidupan yang sehat; (5) pendidikan yang inklusif; (6) kesetaraan gender; (7) ketersediaan air; (8) sanitasi; (9) energi; (10) pertumbuhan ekonomi; (12) infrastruktur; (13) kesenjangan antar wilayah; (14) pemukiman; (15) pola produksi dan konsumsi; (16) perubahan iklim; (17) kelestarian sumber daya laut; (18) penggunaan ekosistem darat berkelanjutan; (19) kedamaian masyarakat; dan (20) kemitraan global. Isu-isu tersebut saat ini dan di masa mendatang diyakini menjadi isu yang dihadapi oleh banyak negara dan daerah di dunia ini serta masih akan menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Apalagi bagi Kabupaten Malinau yang memiliki kawasan hutan serta keberadaannya yang merupakan wilayah hulu dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara wajib untuk memberikan perhatian kepada isu SDGs tersebut.

4.2.1.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Indonesia merupakan satu diantara beberapa negara yang menjadi anggota organisasi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang sudah menyepakati pelaksanaan MEA pada tahun 2015. Implikasi dari kesepakatan ini adalah kesiapan bangsa Indonesia dalam bersaing dengan bangsa lain anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Oleh karenanya, seluruh anak bangsa Indonesia harus menggali segala potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan meningkatkan daya saing.

Sebagaimana diketahui satu bidang yang menjadi fokus adalah bidang ekonomi. Saat ini beberapa negara ASEAN menunjukkan perkembangan signifikan, sebagai contoh Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang kini tidak hanya sekadar sebagai konsumen, melainkan juga menjadi produsen bagi negara-negara lain. Hal ini adalah nilai yang positif tentunya. Keberadaan Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara mendorong negara-negara ASEAN dalam menggagas kerja sama dalam bidang perdagangan yang lebih luas lagi. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) digagas untuk membentuk pasar tunggal dan menciptakan kondisi yang kompetitif antar negara demi peningkatan negara-negara anggota. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan dari MEA itu sendiri, yakni: (1) Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi (*production base*) dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas, seperti tenaga kerja (terdidik/terampil), bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan; (2) Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, kelancaran aktivitas *e-Commerce*, dan pengembangan infrastruktur; (3) Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi UsahaKecil dan Menengah (UKM); dan (4) Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global.

Dari ke 4 (empat) tujuan MEA sebagaimana disebut diatas, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 telah menelaah dan berkomitmen akan memasukan program yang sesuai untuk mendukung terlaksananya tujuan MEA di daerah ini.

4.2.1.3 Perubahan Iklim

Dalam beberapa dekade terakhir ini perubahan iklim (*climate change*) menjadi permasalahan bagi banyak negara di dunia.

Perubahan iklim ini merupakan akibat dari emisi gas rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi, sebagai akibatnya terjadi berbagai gangguan terhadap berbagai sendi kehidupan seperti produktivitas pertaniannya, transportasi, industri dan lain-lain, yang selanjutnya berdampak pada kegagalan perekonomian negara dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Dampak lanjutannya adalah kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara yang memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah dan memicu konflik.

Saat ini, perubahan iklim bukan lagi merupakan suatu isu melainkansuatu fenomena yang berdampak nyata di kehidupan manusia, diantaranya kelangkaan sumber daya alam (penurunan produksi pangan dan ketersediaan air), kerusakan habitat flora dan fauna, gangguan kesehatan, serta peningkatan bencana hidrometeorologi.Perubahan iklim memiliki multiplayer dampak, perubahan iklim pada faktanya tidak hanya berpengaruh pada persoalan iklim dan sumberdaya alam, melainkan juga berpengaruh pada dinamika suatu komunitas baik dalam bentuk negara maupun kelompok adat. Bencana kekeringan dan instabilitas pangan nasional di Afrika menjadi salah satu contohnya.

Kabupaten Malinau sebagai salah satu kabupaten konservasi hutan di Indonesia telah berkontribusi terhadap isu perubahan iklim ini. Bahkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini terus ditingkatkan dan diperluas terutama hutan yang terletak pada kawasan Heart of Borneo (HoB) di Kabupaten Malinau. Selain itu, melalui kegiatan ini kesejahteraan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan HoB terus meningkat kesejahteraannya.

4.2.1.4 Era Industri 4.0

Saat ini dunia telah memasuki era baru revolusi industri keempat, di mana kekuatannya ditopang oleh revolusi industri ke tiga dan pesatnya kemajuan bidang informasi teknologi. Revolusi industri ke empat ini ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi sehingga kita melihat suatu area baru yang terdiri dari tiga bidang ilmu independen: fisika, kimia, digital dan biologi.

Dimana dunia kini memperoleh internet dengan interkonektivitas yang begitu cepat. Tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya bahwa kita bisa menjelejahi dunia maya dengan menggunakan komputer. Selain itu, kita sekarang dapat melihat berbagai hal seperti: (1) otomatisasi terjadi pada pabrik-pabrik yang memproduksi barang secara masal; (2) data yang masif baik jenis maupun jumlahnya yang saat ini dikenal sebagai "big data"; dan (3) sarana logistik yang terorganisasi dengan begitu baik.

Revolusi industri keempat bahkan menjadi fokus utama perdebatan pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum, WEF) pada tanggal 20-23 Januari 2016 di Davos, Swiss. Terdapat tiga hal yang membedakan revolusi industri keempat dibanding revolusi industri sebelumnya, yaitu: *Pertama*, inovasi dapat dikembangkan dan disebarkansecara lebih cepat dari sebelumnya. *Kedua*, penurunan biaya produksi dan munculnya berbagai *platform* yang dapat menyatukan dan mengkonsentrasikan beberapa bidang keilmuan yang menyebabkan perubahan pada seluruh sistem produksi, manajemen, maupun tata kelola yang terbukti meningkatkan output pekerjaan. *Ketiga*, revolusi industri keempat ini berpengaruh global yang berarti terjadi dan terbentuk di hampir semua Negara/daerah di dunia, di mana cakupan transformasi ini terjadi pada semua bidang industri, dan bahkan akan mempunyai dampak menyeluruh pada level sistem di banyak tempat.

Oleh karenanya, revolusi industri keempat ini harus menjadi isu strategis dunia yang patut menjadi perhatian dalam kerangka pembangunan diberbagai belahan dunia, tak terkecuali bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Mengapa demikian, karena revolusi industri keempat mempunyai potensi untuk memberdayakan individu dan masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau, karena dapat menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan pribadi. Telah diakui bahwa perkembangan revolusi industri keempat memberikan tawaran dan kesempatan mengarah padapeningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Banyak pakar berpendapat bahwa revolusi industri keempat dapat menaikkan rata-rata pendapatan

per kapita di dunia, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta memperpanjang usia hidup manusia, dimana terlihat sekali teknologi yang dihasilkan di era ini telah memberikan kemudahan dalam kehidupan bagi penggunanya. Tetapi, revolusi industri ini juga dapat menyebabkan marjinalisasi beberapa kelompok, memperburuk ketimpangan sosial, meningkatkan konflik dan menciptakan risiko keamanan yang baru, serta dapat merusak hubungan antar manusia di wilayah ini.

4.2.1.5 Pandemi Covid-19 Dan Ekonomi Global

Pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara membuat perekonomian global semakin terpuruk. Bahkan banyak lembaga keuangan menyebut kondisi ini merupakan yang terparah sepanjang 90 tahun terakhir dan berpotensi terjadinya resiko resesi. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), China, Jerman dan Inggris diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Jepang juga masuk dalam daftar negara yang ekonominya akan memburuk akibat dampak Corona. Di sisi lain, kondisi ini juga diikuti oleh terganggunya perdagangan global karena terdampak *corona virus*.

Saat ini berbagai negara harus berupaya sekuat tenaga untuk mengatasi pandemi covid-19 yang telah menelan ratusan ribu korban jiwa dan jutaan orang yang diputus hubungan kerjanya. Ini artinya telah terjadi krisis kesehatan, yang diikuti krisis ekonomi dan pasar keuangan. Akibatnya semakin berkurangnya investasi yang kemudian menimbulkan masalah mendalam bagi para pelaku bisnis. Akhirnya untuk menyembuhkan luka tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh masyarakat harus berupaya bekerja sama untuk menekan penyebaran virus sampai ditemukannya vaksin bagi virus korona. Hal ini bermakna pemerintah juga dihadapkan pada persoalan bantuan kepada pekerja dan kepada pengusaha.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Berbagai isu dihadapi Indonesia dalam pembangunan, isu tersebut antara lain adalah: (1) ketersediaan sumber daya alam (SDA) sebagai modal utama pembangunan makin berkurang,

dimana saat kondisinya makin berkurang. Hal itu terjadi karena adanya peningkatan pemanfaatan SDA sebagai sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus juga menjadi sumber devisa; (2) Masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), masih adanya ketimpangan pendapatan, terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia (terutama Pulau Jawa), terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; (3) rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (4) belum optimalnya infrastruktur layanan dasar, ekonomi, energi dan ketenagalistrikan serta infrastruktur transformasi digital; (5) melemahnya ideologi dan belum kuatnya karakter bangsa; (6) penurunan kualitas lingkungan hidup; (7) masih perlunya pengembangan demokrasi; (8) belum mapannya tata kelola pemerintahan; (9) stabilitas politik hukum dan keamanan; dan (10) lain-lain. Berkenaan dengan isu strategis nasional ini secara rinci disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6
Isu Strategis Nasional Berdasarkan Agenda Pembangunan 2020-2024

Isu Strategis Agenda Pembangunan 1: **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan**
1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam 2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi 3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat 4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
Isu Strategis Agenda Pembangunan 2: **Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**
1. Masih adanya ketimpangan antarwilayah dengan ciri: a. Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) b. Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392 c. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa d. Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan e. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal,

desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Isu Strategis Agenda Pembangunan 3:
Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas Dan Berdaya Saing

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.
2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk.
3. Pemenuhan Layanan Dasar.
4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.
5. Pengentasan Kemiskinan.
6. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

Isu Strategis Agenda Pembangunan 4:
Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan

1. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa.
2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama.
5. Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan.
6. Belum Optimalnya Peran Keluarga.
7. Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.

Isu Strategis Agenda Pembangunan 5:
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
   a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau.
   b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman.
   c. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan.
   d. Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
   e. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
   f. Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
2. Infrastruktur Ekonomi
   a. Konektivitas Jalan.
   b. Konektivitas Kereta Api.
   c. Konektivitas Laut.
   d. Konektivitas Udara.
   e. Konektivitas Darat.
   f. Transportasi Perkotaan.
   g. Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan.
   h. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan.
   i. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan.
   j. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.
3 Energi dan Ketenagalistrikan
   a. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan.
   b. Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan.
   c. Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan.
4. Transformasi Digital
   a. Penuntasan Infrastruktur TIK.
   b. Pemanfaatan Infrastruktur TIK.
   c. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

Isu Strategis Agenda Pembangunan 6:
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
   a. Deplisi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup..

	b. Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. a. Tingginya Risiko Bencana di Indonesia. b. Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi. c. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometereologi akibat Perubahan Iklim. d. Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana di Daerah.
3.	Pembangunan Rendah Karbon a. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Rendah Karbon. b. Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon.
Isu Strategis Agenda Pembangunan 7: **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	
1	Konsolidasi Demokrasi a. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. b. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. c. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi.
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri a. Aspek keamanan seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga antarnegara di tengah arus globalisasi yang meningkatkan kompleksitas permasalahan WNI yang melakukan migrasi. b. Belum optimalnya penanganan pasar nontradisional yang sebagian besar negara Selatan–Selatan. c. Perlunya sinergi diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosialbudaya. d. Perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global dengan pendekatan diplomasi total.
3	Penegakan Hukum Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola a. Profesionalitas ASN, data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa dari 34 Kementerian, baru 6 Kementerian yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik. b. Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS). c. Jumlah pengaduan masyarakat meningkat signifikan dengan mayoritas pengaduan terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. d. Masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi.
4	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional a. Dinamika Ancaman Pertahanan. b. Dukungan Industri Pertahanan Belum Optimal. c. Dinamika Ancaman Siber. d. Indonesia Menjadi Negara Tujuan Peredaran Gelap Narkotika. e. Pelanggaran Wilayah dan Angka Kejahatan di Perbatasan. f. Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat. g. Tingginya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Laut. h. Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam.

Sumber: RPJMN 2020-2024 (2020)

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil penyelarasan antara isu strategis dan misi kepala daerah terpilih yang di laksanakan dalam Rapat Koordinasi Gubernur menghasilkan kesepakatan isu strategis RPJMD tahun 2021-2026 adalah:

1. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM.
2. Masih rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global.
5. Masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi.
6. Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan.

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Malinau dianalisis berdasarkan pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan disinkronisasikan dengan isu-isu strategis yang ada di ranah internasional, nasional dan provinsi. Hasil analisis isu-isu strategis yang juga memperhatikan berbagai masukan dari diskusi terfokus para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan selanjutnya perlu tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026 yang dikelompokan berdasarkan aspek penting dalam agenda pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih).
2) Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan.
3) Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air

bersih dan sanitasi, lingkungan hidup dan kawasan permukiman.

4) Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
5) Masih adanya kesenjangan wilayah dan belum optimalnya infrastruktur (infrastruktur layanan dasar, ekonomi, ketenagalistrikan, air dan Teknologi Informasi Komputer).
6) Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi.
7) Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
8) Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan.

4.2.5 Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

Dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Malinau terdapat beberapa rekomendasi yang tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.7
Rekomendasi Program dan Kegiatan Kabupaten Malinau KLHS RPJMD 2021-2026

No TPB	No Indi-kator	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
Pilar Sosial					
TPB 01	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Ketenagakerjaan	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Program	1. Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan 2. Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan 3. Pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
TPB 03	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan dan P2KB	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupate	1. Peningkatan upaya promosi kesehatan khsusus terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat 2. Peningkatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat terkait jaminan kesehatan
TPB 05	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan	1. Advokasi kebijakan dan pedampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Pilar Lingkungan					
TPB 11	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Malinau	1. Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten 2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana 3. Pengembangan system peringatan dini (early warning system) bencana

No TPB	No Indi-kator	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
				2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Penyusunan rencana penanggulangan Bencana 2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 3. Penyediaan peralaratan perlindungan dan kesiapan bencana 4. Pengelolaan resiko bencana tingkat kabupaten 5. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 6. Penanganan pascabencana 7. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana
Pilar Hukum dan Tata Kelola					
TPB 16	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	1. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	1. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan. 2. Advokasi kebijakan dan pedampingan peningkatan partisipasi bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
				2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan	1. Advokasi kebijakan dan pedampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Pilar Ekonomi					

No TPB	No Indi-kator	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
TPB 17	17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 2. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 6. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi 7. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 8. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2026

4.3 SASARAN DAN ARAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya terkait dengan isu-isu strategis yang ada di wilayah ini, maka pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mencapai sasaran pokok (utama) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.8 pada kolom "**Sasaran Pokok Pembangunan**". Selanjutnya mengacu pada sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah Kabupaten Malinau 2021-2026 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arahan pembangunan Kabupaten Malinau adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.8 pada kolom "**Arahan Pembangunan**".

Tabel 4. 7
Sasaran Pokok dan Arahan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 Berdasarkan Isu Strategis

ISU STRATEGIS 1: ***Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih)***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi industri melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang yang berkelanjutan	Meningkatkan nilai pengelolaan SDA yang berkelanjutan
ISU STRATEGIS 2: ***Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Berkembang dan semakin mantapnya ekonomi lokal dalam rangka transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor ekonomi sekunder maupun tersier yang menyerap tenaga kerja	Meningkatkan pertumbuhan sektor primer dan industri pengolahan untuk penguatan kewirausahaan UMKM, dan koperasi yang berdayasaing
ISU STRATEGIS 3: ***Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi,***	

lingkungan hidup dan kawasan permukiman	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam pendapatan, penurunan kemiskinan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan gizi serta sistem perlindungan sosial	Meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan
ISU STRATEGIS 4: ***Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya daya saing SDM melalui peningkatan Kesehatan dan Pendidikan penduduk	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
ISU STRATEGIS 5: ***Belum optimalnya infrastruktur dan adanya kesenjangan antar wilayah***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang menurunkan tingkat kesenjangan antar-wilayah serta membuat wilayah semakin berkembang	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan
ISU STRATEGIS 6: ***Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi***	
Meningkatnya akses dan ketersediaan pangan dan energi	Meningkatkan akses dan ketersediaan pangan dan energi
ISU STRATEGIS 7: ***Menurunnya kualitas lingkungan hidup***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunnya emisi gas rumah kaca dan bencana akibat kerusakan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
ISU STRATEGSI 8: ***Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, bertanggungjawab, efisien, efektif, tertib dan aman	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban keamanan melalui pemantapan reformasi birokrasi